



**BUPATI KAPUAS HULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 800.1.2.2/1215/BKS/P2DK**

**TENTANG**

**SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan rincian formasi sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. Adapun aturan dan ketentuan dalam seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam penjelasan pengumuman ini dan hanya berlaku khusus pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

## II. KETENTUAN UMUM

Adapun ketentuan umum pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia;
2. Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan daerah;
3. Formasi yang diperuntukkan penyandang disabilitas hanya boleh dilamar oleh pelamar yang menyandang disabilitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
4. Pelamar wajib melakukan pendaftaran awal dengan memilih jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
5. Pelamar secara cermat melihat, mempelajari dan memilih kategori formasi yang diambil agar tidak merugikan diri sendiri saat melakukan pendaftaran.
6. Pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://sscASN.bkn.go.id> ;
7. Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang terdiri dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);

### III. FORMASI JABATAN YANG DIBUKA

Jumlah alokasi formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sebanyak 206 (dua ratus enam) formasi dengan rincian:

- Calon Pegawai Negeri Sipil jabatan teknis : 162 (seratus enam puluh dua) formasi;
- Calon Pegawai Negeri Sipil jabatan tenaga kesehatan : 44 (empat puluh empat) formasi.

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

### IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan dalam pendaftaran Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi persyaratan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun 0 bulan sampai 35 (tiga puluh lima) tahun 0 bulan pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:

- a. dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
  - b. dokter pendidik klinis;
- dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 0 bulan pada saat melamar;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
    - a. PNS; atau
    - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama.
  4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan dengan ketentuan pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
  10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
  12. PPPK dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan syarat sudah memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 tahun dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan:

- a. PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melamar jenis jabatan yang sama pada saat menjadi PPPK aktif;
  - b. PPPK wajib mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja terkecil dilakukan secara berjenjang sampai dengan pejabat setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II (format surat permohonan untuk mengikuti Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi PPPK dan rekomendasi pimpinan unit kerja dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/FormatPersetujuanP3Kaktif> ;
  - c. Permohonan beserta rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil paling lambat disampaikan ke BKPSDM Kab. Kapuas Hulu cq. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada tanggal 31 Agustus 2024;
13. Pelamar hanya dapat memilih pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) unit kerja penempatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
- a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN, dengan ketentuan wajib melampirkan:
- a. surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. menyampaikan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
15. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan

- c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
- 1) dokumen/ surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - 2) menyampaikan *link* video video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar diwajibkan membaca *Frequently Asked Questions* (FAQ) dan petunjuk pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> ;
2. Petunjuk/Panduan pendaftaran dapat diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> ;
3. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan;
4. Pelamar Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 melakukan pendaftaran secara daring ke alamat *website* Portal Sistem Seleksi Calon ASN Nasional (SSCASN) 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. wajib memiliki *email* yang masih aktif dan dapat diakses oleh pelamar;
  - b. membuat akun pendaftaran melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengisi : NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor KK (Kartu Keluarga), *e-mail* aktif, membuat *password* Akun Portal SSCASN dan pertanyaan pengaman, upload pass foto terbaru ukuran maksimal 200 KB dan mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2024;



- c. *login* ke Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan;
- d. mengunggah (*upload*) foto diri dengan memegang/ memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;

- e. melakukan pengisian biodata dan memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan;
- f. mengunggah dokumen persyaratan yang tercantum dalam portal SSCASN dalam format yang sudah ditentukan sebagai berikut:
- 1) Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (format jpeg);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya (format pdf);
  - 3) Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai (format pdf);
  - 4) Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat pernyataan tidak meminta mutasi/pindah dari instansi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum 10 (sepuluh) tahun masa kerja terhitung dari mulai pengangkatan sebagai CPNS yang masing-masing sudah ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai (format pdf);
  - 5) Tangkapan Layar (*Screenshot*) Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada PDDIKTI pada tautan <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> BAN-PT atau sertifikat akreditasi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (format pdf);
  - 6) Scan Ijazah asli berwarna dan Transkrip Nilai asli berwarna bagi lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan jabatan dalam formasi yang dibuka (format pdf). Pelamar yang mengunggah ijazah dan transkrip nilai legalisir akan digururkan dalam seleksi administrasi;
  - 7) Tenaga Kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sampai dengan saat melamar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- g. Jika terdapat persyaratan yang memiliki lebih dari 1 (satu) dokumen, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan format pdf (contoh: pelamar memiliki ijazah profesi maka dokumen yang diunggah adalah ijazah S-1 dan ijazah Profesi yang dijadikan 1 (satu) file dalam format pdf, demikian juga dengan transkrip nilainya);

- h. Format surat lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan Tidak Meminta Mutasi/Pindah Dari Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum 10 (sepuluh) tahun masa kerja dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/DokumenuploadCPNS2024> ;
  - i. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
  - j. mencetak Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran SSCASN Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2024.
5. Semua informasi atau data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran *online* harus diisi secara benar dan hati-hati berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
  6. Data yang telah dilakukan finalisasi/resume tidak dapat diperbaiki atau diubah;
  7. Kesalahan pelamar pada saat melakukan pendaftaran secara daring maupun penginputan data dan berkas merupakan tanggung jawab pelamar sepenuhnya;
  8. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

## VI. JADWAL TAHAPAN PENERIMAAN

Adapun tahapan jadwal Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024

8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

## VII. KETENTUAN LAIN

- Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- Segala informasi tambahan yang terbit setelah tanggal pengumuman ini akan disampaikan melalui laman <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/cpns> ;

3. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan kembali;
4. Pelamar yang akan mendaftar wajib memeriksa dengan seksama kesesuaian kualifikasi program studi pendidikan yang dimiliki terhadap jabatan yang akan dilamar agar seleksi administrasi dapat berjalan dengan lancar;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga agar segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Jika pelamar dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur;
7. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
8. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
9. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 bersifat **mutlak** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
10. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia. Kepada peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
11. Seluruh Informasi mengenai Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 akan disampaikan melalui laman <http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/cpns> dan akun Instagram BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu: @bkpsdmkab.kapuashulu sehingga diharapkan dapat terus memantau perkembangan informasi pada laman tersebut;

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan melalui fasilitas *helpdesk online*: <https://tawk.to/bkpsdmkapuashulu> atau *contact person* admin pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 di nomor WA 082154457744 (hanya WA tidak melayani panggilan telepon) atau langsung menghubungi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu (Alamat : Jl. Lintas Selatan No. 26 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan) pada hari dan jam kerja;
13. Panitia Seleksi Daerah (Panselda) tidak membuka layanan melalui media lainnya selain yang disebutkan di atas, sehingga peserta diharapkan berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia;
14. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami ketentuan dalam pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar sendiri.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Putussibau, 19 Agustus 2024



LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN  
 NOMOR : 800.1.2.2/1215/BKS/P2DK  
 TENTANG  
 SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI  
 SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPII  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TAHUN ANGGARAN 2024

1. JABATAN TENAGA KESEHATAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	DOKTER AHLI PERTAMA - SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI / DOKTER SPESIALIS ANESTESI / SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	DOKTER SPESIALIS ANAK
3	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BIKA	PROFESI DOKTER GIGI
4	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	PROFESI DOKTER GIGI

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BOYAN TANJUNG	
5	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS KALIS	PROFESI DOKTER GIGI
6	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMPANANG	PROFESI DOKTER GIGI
7	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BATANG LUPAR	PROFESI DOKTER GIGI
8	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SUHAID	PROFESI DOKTER
9	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMPANANG	PROFESI DOKTER
10	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BOYAN TANJUNG	PROFESI DOKTER
11	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PURING KENCANA	PROFESI DOKTER
12	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	PROFESI DOKTER

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BUNUT HILIR	
13	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BATANG LUPAR	PROFESI DOKTER
14	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HULU	PROFESI DOKTER
15	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BADAU	PROFESI DOKTER
16	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BIKA	PROFESI DOKTER
17	DOKTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HILIR	PROFESI DOKTER
18	DOKTER AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD BADAU	PROFESI DOKTER
19	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BOYAN TANJUNG	PROFESI APOTEKER
20	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BADAU	PROFESI NERS

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
21	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMPANANG	PROFESI NERS
22	BIDAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PURING KENCANA	PROFESI BIDAN / D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / SARJANA SAINS TERAPAN KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) / D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021)
23	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / PROFESI NERS / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV PENATA ANESTESI
24	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	D-IV FISIOTERAPI / PROFESI FISIOTERAPIS
25	PERAWAT TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PURING KENCANA-PUSTU KANTUK ASAM KEC. PURING KENCANA	D-III KEPERAWATAN
26	PERAWAT TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN-PUSTU TANJUNG LOKANG KEC. PUTUSSIBAU SELATAN	D-III KEPERAWATAN
27	PERAWAT TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SILAT HULU	D-III KEPERAWATAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
28	PERAWAT TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HULU-PUSTU BATU LINTANG KEC. EMBALOH HULU	D-III KEPERAWATAN
29	PERAWAT TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SILAT HILIR	D-III KEPERAWATAN
30	PERAWAT TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HILIR-PUSTU KIRIN NANGKA KEC. EMBALOH HILIR	D-III KEPERAWATAN
31	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PENGKADAN	D-III KEBIDANAN
32	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BATANG LUPAR	D-III KEBIDANAN
33	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PURING KENCANA-PUSTU MERAKAI PANJANG KEC. PURING KENCANA	D-III KEBIDANAN
34	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SEMITAU	D-III KEBIDANAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
35	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HULU	D-III KEBIDANAN
36	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SEBERUANG	D-III KEBIDANAN
37	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SELIMBAU	D-III KEBIDANAN
38	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS MENTEBAH	D-III KEBIDANAN
39	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SILAT HULU	D-III KEBIDANAN
40	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS JONGKONG	D-III KEBIDANAN
41	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BUNUT HILIR	D-III KEBIDANAN
42	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	D-III KEBIDANAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PUTUSSIBAU SELATAN-PUSTU SALEN / KAREHO KEC. PUTUSSIBAU SELATAN	
43	BIDAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SUHAID	D-III KEBIDANAN
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	

## 2. JABATAN TEKNIS

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
1	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN   UPT PEMBENIHAN, PEMBIBITAN DAN KESEHATAN HEWAN	DOKTER HEWAN
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA- BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	S-1 PARIWISATA / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S- 1 SEJARAH
3	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S- 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 BISNIS / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH   BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 PARIWISATA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ADMINISTRASI BISNIS
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA   BIDANG KEPEMUDAAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 PARIWISATA / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT
10	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERTANIAN DAN PANGAN-BIDANG KETAHANAN PANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 SOSIOLOGI / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
11	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH-BIDANG ASET DAERAH	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN
12	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH-BIDANG AKUNTANSI	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK
13	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN ORGANISASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
14	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
15	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
	APARATUR AHLI PERTAMA			SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
16	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH-SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
18	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI
19	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV KEUANGAN PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / S-1

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
					ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 PARIWISATA / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ANALISIS KEUANGAN
20	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU III	S-1 TEKNIK SIPIL
21	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU I	S-1 TEKNIK SIPIL
22	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	S-1 HUKUM
23	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU IV	D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI
24	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU II	D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI
25	KONSELOR SDM	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI
26	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, DAN TRANSMIGRASI-BIDANG TENAGA KERJA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
27	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN BADAU   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN BADAU	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
28	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN SELIMBAU   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
29	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN BIKA   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN BIKA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
30	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN SEMITAU   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SEMITAU	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
31	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN SEBERUANG   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SEBERUANG	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
32	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
33	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN KALIS   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN KALIS	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
34	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN SUHAID   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SUHAID	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
35	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
36	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN JONGKONG   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN JONGKONG	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
37	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN SILAT HULU   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SILAT HULU	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
38	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
39	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN MENTEBAH   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN MENTEBAH	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
40	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN EMBALOH HULU   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN EMBALOH HULU	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
41	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN HULU GURUNG   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN HULU GURUNG	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
42	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN BUNUT HILIR   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN BUNUT HILIR	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
43	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN EMPANANG   SEKSI	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN EMPANANG	PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
44	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN PENGKADAN   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
45	PAMONG PEMERINTAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   KANTOR KECAMATAN PURING KENCANA   SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN PURING KENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
46	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-BIDANG SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
47	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV ARSITEKTUR / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI
48	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG BINA MARGA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV ARSITEKTUR / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK SIPIL

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
49	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN JALAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN
50	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-UPT DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE I	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN
51	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERIKANAN   BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	S-1 AGROBISNIS PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / D-IV TEKNIK KELAUTAN / D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / D-IV AGROBISNIS PERIKANAN / S-1 PERIKANAN
52	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERIKANAN   UPT BENIH IKAN	S-1 AGROBISNIS PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / D-IV AGROBISNIS PERIKANAN / D-IV TEKNIK KELAUTAN / S-1 PERIKANAN
53	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP	S-1 AGROBISNIS PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / D-IV AGROBISNIS PERIKANAN / D-IV TEKNIK KELAUTAN / S-1 PERIKANAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
54	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 AGRONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 BISNIS
55	PENATA KEPROTOKOLAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA
56	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 GEOGRAFI
57	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN
58	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 GEOGRAFI / D-IV GEOGRAFI / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
59	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / D-IV ARSITEKTUR / D-IV GEOGRAFI LINGKUNGAN
60	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERTANIAN DAN PANGAN-BIDANG PETERNAKAN	S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV PENYULUH PETERNAKAN
61	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
					ARSITEKTUR / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV TEKNIK LISTRIK / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
62	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG TATA LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA
63	PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK-BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA	S-1 STATISTIKA / S-1 KOMPUTASI STATISTIKA / D-IV MATEMATIKA / S-1 MATEMATIKA STATISTIKA / S-1 ILMU STATISTIKA
64	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG PERDAGANGAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 BIOLOGI / S-1 BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 FISIKA / S-1 KIMIA
65	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 FARMASI / S-1 BISNIS / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
66	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG SUMBER DAYA AIR	S-1 ARSITEKTUR / S-1 AGRONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
67	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 EKONOMI / S-1 FISIKA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 PERKEBUNAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 SOSIAL
68	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM
69	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERTANIAN DAN PANGAN-BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	S-1 AGRONOMI / S-1 PERKEBUNAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 ILMU TANAH / D-IV PENYULUH PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA
70	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-BIDANG SOSIAL	S-1 SOSIOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV LAYANAN PUBLIK
71	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 KOMUNIKASI
72	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   UPT DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ARSITEKTUR
73	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 HUBUNGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				KELUARGA BERENCANA   RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU   BAGIAN TATA USAHA   SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KOMUNIKASI / S-1 KEPERAWATAN / D-IV KEBIDANAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN
74	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PARIWISATA / S-1 PENDIDIKAN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KOMUNIKASI / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN
75	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KOMUNIKASI / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / D-IV AKUNTANSI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
76	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	1	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK
77	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT
78	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV AKUNTANSI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
79	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV AKUNTANSI
80	PERENCANA AHLI PERTAMA	2	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KOMUNIKASI / S-1 KEPERAWATAN / D-IV KEBIDANAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN
81	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN   SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRONOMI / D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS
82	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 FISIKA / S-1 PENDIDIKAN JASMANI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
83	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SEJARAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEHUTANAN / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
84	PRANATA HUBUNGAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK-BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SEJARAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
	MASYARAKAT AHLI PERTAMA				ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEHUTANAN / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
85	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI BISNIS
86	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU- SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SEJARAH / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 KEHUTANAN / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
87	PRANATA KEWILAYAHAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
88	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   RSUD SEMITAU	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA
89	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   RSUD BADAU	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA
90	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU- SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN UMUM	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
					SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA
91	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	1	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU- SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA
92	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER
93	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG KETENAGAAN KEPENDIDIKAN DASAR	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA
94	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN-BIDANG PERPUSTAKAAN	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL
95	SANDIMAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK- BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA	S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MATEMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI
96	PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG- BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-III TEKNIK PENGAIRAN / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III KONSTRUKSI GEDUNG

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
97	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERIKANAN-BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	D-III KELAUTAN / D-III PERIKANAN
98	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERTANIAN DAN PANGAN-BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN
99	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
100	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN BOYAN TANJUNG	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
101	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN PURING KENCANA	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
102	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
					AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
103	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SEMITAU	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
104	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN EMPANANG	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
105	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN-BIDANG KEARSIPAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
106	ARSIPARIS TERAMPIL	-	1	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
107	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III FARMASI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
108	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-SEKRETARIAT	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III FARMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
109	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SUHAID-SEKRETARIAT KECAMATAN SUHAID	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III FARMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
110	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN BADAU	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III GIZI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III FARMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
111	ARSIPARIS TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SILAT HULU	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
					AKUNTANSI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III AGRIBISNIS / D-III FARMASI / D-III GIZI / D-III ANALISIS KIMIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER
112	DOKUMENTALIS HUKUM	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN
113	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN JALAN LINGKUNGAN	D-III ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III MESIN OTOMOTIF / D-III ALAT BERAT / D-III TEKNIK PENGAIRAN / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
114	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	2	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG TATA RUANG	D-III MANAJEMEN / D-III GEOGRAFI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III PERTANIAN / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN
115	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-UPT DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE II	D-III ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III PERTAMANAN / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III TEKNIK MESIN
116	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG SUMBER DAYA AIR	D-III ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III PERTAMANAN / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK PENGAIRAN / D-III TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
117	PENERA TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN	D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI / D-III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				PERDAGANGAN-UPT PENGELOLA PASAR DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL	
118	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERTANIAN DAN PANGAN-BIDANG PETERNAKAN	D-III PRODUKSI TERNAK / D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN
119	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KEHUMASAN / D-III KOMUNIKASI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT
120	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERIKANAN   UPT BENIH IKAN	D-III PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III KELAUTAN / D-III PENANGKAPAN IKAN / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN
121	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP	D-III PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III KELAUTAN / D-III PENANGKAPAN IKAN / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN
122	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	D-III PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III KELAUTAN / D-III PENANGKAPAN IKAN / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN
123	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERTANIAN DAN PANGAN-BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	D-III AGRONOMI / D-III PERKEBUNAN / D-III PETERNAKAN / D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III MANAJEMEN AGROBISNIS / D-III PENYULUHAN PERTANIAN
124	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III BAHASA INGGRIS

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
125	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS PURING KENCANA	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI
126	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI
127	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS BADAU	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
128	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN PENDAPATAN DAERAH-BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
129	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HILIR	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
130	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD SEMITAU	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
131	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS EMBALOH HULU	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
132	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-BIDANG KESATUAN BANGSA	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
133	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-RSUD BADAU	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
134	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   PUSKESMAS EMPANANG	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
135	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   PUSKESMAS JONGKONG	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
136	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	1	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PENDIDIKAN DASAR	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
137	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   PUSKESMAS BUNUT HILIR   SUB BAGIAN TATA USAHA	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
138	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   PUSKESMAS SILAT HULU   SUB BAGIAN TATA USAHA	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
139	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN JONGKONG	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
140	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN HULU GURUNG	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
141	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN BUNUT HULU	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
142	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
143	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN BIKA	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
144	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN EMBALOH HILIR	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
145	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SILAT HULU	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
146	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN EMBALOH HULU	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
147	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-SEKRETARIAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
148	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN BUNUT HILIR	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
149	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS PERIKANAN-SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
150	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SEBERUANG	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
151	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN PURING KENCANA	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
152	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-PUSKESMAS SILAT HILIR	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
153	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN EMPANANG	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
154	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA-BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
155	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, DAN TRANSMIGRASI-SEKRETARIAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
156	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
157	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU-KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI
<b>TOTAL</b>		<b>158</b>	<b>4</b>	<b>162</b>	